

## Jejak Langkah Pendidikan Masa Kolonial dari Muka Volkschool

Regina Permatadewi Tantiy Gunawan<sup>1</sup>, Een Suhaeni<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten

Email: [2288190028@gmail.com](mailto:2288190028@gmail.com)

### Abstrak

Pendidikan yang ada di Indonesia mengalami pasang dan surut yang tertuangkan di dalam kesejarahan pendidikan tersebut. Dimulai dengan adanya Masa Pra-Aksara, Masa Hindu – Buddha, Masa Islam menjulahlah terhadap Masa Kolonial itu sendiri. Disinilah keberadaan pendidikan pun terbilang cukup banyak didalam peninggalan-peninggalannya yang akan membawakan suatu pondasi keterangan dari penerapan sistem pendidikan tersebut yang berhadapan dengan arus keberadaan situasi dan kondisi sebagai penunjangnya. Hal ini pula yang akan membawakan suatu jejak peradaban yang membawakan suatu penelitian terhadap keberadaan Volkschool itu sendiri sebagai peran dari salah satu sekolah baru yang didirikan pasca adanya Sekolah Angka Satu dengan Sekolah Angka Dua. Pengembangan manajemen pendidikan pula yang didasarkan atas kurikulum, pendidik, fasilitas pendukung, inspeksi dan keadaan peserta didik inilah yang akan terkupas satu per satu sebagai bentuk dukungan perkuatan dari keberadaan Volkschool ini sendiri.

**Kata Kunci:** *Masa Kolonial, Volkschool, Manajemen Pendidikan*

### Abstract

Education in Indonesia has experienced ups and downs which are stated in the history of education. Starting with the Pre-literate Period, the Hindu-Buddhist Age, the Islamic Age led to the Colonial Period itself. This is where the existence of education is also quite a lot in its relics which will bring a foundation of information from the application of the education system which deals with the current existence of situations and conditions as supporting it. This will also bring a trace of civilization that will lead to a study of the existence of Volkschool itself as the role of one of the new schools established after the existence of the Number One School with the Number Two School. The development of education management is also based on the curriculum, educators, supporting facilities, inspections and the condition of the students which will be discussed one by one as a form of strengthening support for the existence of the Volkschool itself.

**Keywords:** *Colonial Period, Volkschool, Education Management*

### PENDAHULUAN

Secara hierarki, pendidikan merupakan aktivitas yang melibatkan manusia dalam memanusiakan *manusia*. Pendidikan disini menggiring seorang manusia dalam menumbuhkembangkan kedewasaan diri. Hal inilah yang mengikutsertakan pendidikan terbentuk dalam pengajaran dan pembentukan karakter yang diawali oleh pelatihan dalam struktural pengkajian tingkah laku seorang manusia terhadap kehidupan *personal* maupun kelompoknya. (Tukiran, 2020, hal. 133). Pendidikan merupakan agen persosialisasian bagi manusia. Pada dasarnya, pendidikan dijadikan sebagai ajang dalam pembentukan realitas yang memiliki perbedaan konsep yang signifikansi di dalamnya. Inilah yang menjadikan suatu pendidikan mendapatkan rekonstruksi sosial yang memfokuskan dirinya ke dalam pembentukan kajian teoritis di dalam pembentukan integrasi bangsa itu sendiri. (Sukiyat, 2020, hal. 41)

Pendidikan memiliki pandangan tersendiri di dalam menggelarkan peradaban manusia itu sendiri terutama di dalam mendewasakan diri. Bahkan, pendidikan juga dijadikan sebagai agen rasionalitas persosialan manusia terhadap kehidupan individu maupun kelompoknya. Inilah yang pada akhirnya, pembentukan moral dan karakter yang ditimbulkan melalui pendidikan yang pada akhirnya memunculkan suatu peradaban yang baru di dalamnya yang dihubungkan dengan adanya pengkajian tingkah laku dan adaptasi manusia tersebut dengan lingkungan disekitarnya. Masa – masa berdirinya permukaan dari

pendidikan Indonesia mengalami silih berganti sesuai dengan peradaban dengan zaman yang menaungi wadah pendidikan tersebut. Goresan demi goresan sejarah pun menjadi alur kisah dalam memperjelas asal mula pendidikan di Indonesia yang menjadi suatu kisah tersendiri yang layak untuk dijadikan bekal dalam dunia kesejarahan sebagai salah satunya. Pendidikan tidaklah serta merta menjadikan laju yang spontanitas dalam peradaban masuknya namun justru mengalami perkembangan yang signifikan baik dalam internal maupun eksternalnya.

Terukirnya kisah – kisah pendidikan di Indonesia dimulai dari adanya Masa Praaksara, Masa Hindu – Buddha, Masa Islam, Masa Kolonialis, Masa Jepang hingga kepada Masa Kontemporer itu sendiri berdiri. Pendidikan – pendidikan yang ada menjadikan suatu acuan dalam garfik laju perkembangan pendidikan yang bernaungkan dalam negeri Indonesia terutama dalam kurikulum, peserta didik, dsb. Inilah yang menjadikan suatu regional yang penting dalam menguakkan kisah – kisah pendidikan yang memiliki pengembangannya secara individual. Salah satu yang menjadi kisahnya ialah dalam Masa Kolonialis. Masa Kolonialis merupakan masa – masa penjajahan Belanda yang cukup lama berdiam diri dalam Indonesia. Banyak peninggalan – peninggalan yang menjadi ikonik masa kolonialis untuk dipelajari dan ditelusuri hingga ke masa kini. Salah satunya sudah pasti di dalam dunia pendidikan.

Dunia pendidikan di Indonesia zaman kolonialis menjadi arahan dalam kebesaran petunjuk dari kesejarahan yang cukup begitu panjang dan banyak. Sekolah demi sekolah yang dibangun oleh Belanda menjadi model pengembangan rakyat – rakyat dengan dalih perutamaan sebagai penyebaran agama Kristen Protestan dan memperluas jangkauan Bahasa Belanda itu sendiri terhadap kalangan borjuis dan juga keturunan Belanda itu sendiri. Dari mulai sinilah maka di dalam adanya pendirian sekolah – sekolah tersebut termuatkan adanya pembelajaran agama sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib ditempuh oleh peserta didik. Namun, yang menjadi pokok permasalahan dalam adanya dunia pendidikan ini telah ditemukan adanya pendirian sekolah rakyat desa (Volkschool) di Masa Kolonialis. Volkschool menjadi sekolah yang baru bertunas pada tahun 1907. Sekolah inilah yang menjadi cikal bakal kembali dalam daerah – daerah terpelosok (kedaerahan). Volkschool berdiri pasca adanya Sekolah Angka Satu dengan Sekolah Angka Dua. Inilah yang menjadi modal Belanda dalam memperluas jangkauan pendidikan dengan satu sisi bahwa dari adanya salah satu pihak dari Politik Etis itu sendiri yaitu edukasi. Hal inilah yang menjadi pengeluaran pemerintah Belanda pula terutama terhadap rakyat – rakyat pribumi yang menetap di daerah perdesaan saat itu.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti didasari atas metode kualitatif yang berbentuk pengembangan studi – studi literatur yang terdiri atas buku, jurnal, artikel penelitian. Sumber primer yang digunakan dalam studi literatur merupakan penelitian dengan mengheuristikkan 2 permukaan sumber sebagai penunjangnya yang terdiri atas sumber primer maupun sumber sekunder. (Hermawan, 2019, hal. 22). Sumber primer lebih memandang terhadap publikasi yang dirilis langsung oleh sang peneliti. Disini, peneliti mengkajikan teoritis pembahasannya langsung kepada para pembaca. Biasanya, sumber primer yang sering ditemukan di dalam penelitian terdapat di dalam jurnal penelitian yang terbit pada hitungan bulanan ataukah 3x per tahunnya dan juga yang terdapat di dalam artikel ilmiah yang termuatkan ke dalam laporan hasil penelitian. (Hermawan, 2019, hal. 23). Sumber sekunder lebih memandang terhadap publikasi yang telah dikaji ulang oleh sang penulis di dalam teoritis pembahasannya. Biasanya, penulis disini akan menarasikan kembali dalam bentuk pendeskripsian kembali kajian teoritis yang telah dimuatkan dan dipublikasikan oleh peneliti dengan dikombinasikannya berupa *review*, analisis pribadi, dsb. Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya buku, ensiklopedia pendidikan, kajian teoritis penelitian ataupun dengan catatan buku tahunan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mengenal Sejarah Volkschool**

Kembali kepada tahun 1907 yang merupakan tahun dimana diciptakanlah suatu persekolahan baru pasca didirikannya Sekolah Angka Satu dengan Sekolah Angka Dua di Indonesia itu berada. Persekolahan

tersebut menjadi penyebaran jangkauan cahaya dalam peningkatan kesejarahan penduduk di Indonesia. Persekolahan ini pula yang dinamakan dengan *Volkschool*. Dari adanya penerapan kebijakan Politik Etis yaitu Irigasi, Edukasi dan Emigrasi yang membawakan sarana pendidikan itu paling penting untuk didirikan sesuai dengan pendapat dari Gubernur Jenderal *Van Heutz* dengan Menteri Jajahan *Fock*. Namun dipandang dari kedua tokoh tersebut memiliki perbedaan yang sebagaimana terdapat dalam seperti apa dan bagaimana sekolah yang paling efisien dan efektif dengan keberadaan di Masa Kolonialis tersebut. Gubernur Jenderal *Van Heutz* lebih memandangkan sistem pendidikan dengan nuansa yang lebih sederhana dengan murah namun dari sisi Menteri Jajahan *Fock* itu sendiri lebih memandangkan sistem pendidikan dengan pengembangan dari Sekolah Angka Dua (Kelas Dua).

Menteri Jajahan *Fock* itu sendiri lebih mengandalkan dari adanya pengembangan secara langsung dari Sekolah Angka Dua (Kelas Dua) yang ada dan juga lebih menyiap sediakan anggaran pembiayaan f 656.000 dalam pendirian 186 sekolah – sekolah yang baru di Indonesia. Sebab keterbatasan dalam pekerjaan proyeknya dan juga pendidikannya maka di dalam kurun waktu setahun hanya dapat mendirikan 50 – 60 buah sekolah di Indonesia. Di dalam penjadian Sekolah Angka Dua sebagai sekolah umum rakyat maka diperlukannya pembiayaan dalam bentuk anggaran yang kurang lebih f 417 juta ataupun kurang lebih sebanyak pengeluaran yang akan diminta oleh Gubernur Hindia Belanda itu sendiri dalam pengelolaan Sekolah Angka Dua tersebut. Gubernur Jenderal *Van Heutz* memandang bahwa dalam pengusahaan melakukan ekspansi yang lebih luas dalam dunia pendidikan maka diperlukannya suatu pencarian sekolah yang lebih murah dan lebih sederhana dibandingkan dengan sebelumnya. Secara kebetulan, Gubernur Jenderal *Van Heutz* yang memiliki relasi dengan percobaan dari *De Bruyn Prince* yang sebagaimana seseorang dari asisten residen Ambarawa (1890-1894) yang telah mendirikan sekolah – sekolah sebanyak 100 di berbagai perdesaan. Selain adanya pembelajaran dalam bentuk tulis menulis, membaca dan menghitung dalam bahasa Jawa juga dipelajarikan mengenai pembelajaran yang menggunakan pekerjaan tangan seperti halnya dalam pembuatan keranjang, pot, genteng, dsb.

Wadah – wadah pendidikan yang menjadi sekolah sementara terdapat dalam pendopo yang mana dalam pendiriannya menggunakan bantuan dari para peserta didiknya sendiri. Kayu yang menjadi alas pendopo itu sendiri yang diambil dari pepohonan kopi yang ditebang dan berada di dalam hutan letaknya. Pendidik – pendidik yang mengajarkannya juga berasal dari penduduk rakyat daerah itu sendiri yang sebagaimana akan mendapatkan upah dalam bentuk sebidang tanah sebagai sumber mata pencaharian tambahan yang dilengkapi pula apabila dapat menjual hasil karya kerajinan tangan para peserta didiknya maka akan menjadi sumber tambahan pendapatan pula dari seorang pendidik tersebut.

Sekolah ini pula termasuk primitif. Anak – anak yang duduk di lantai dengan alas dari kayu seperti di perumahan mereka masing – masing. Meja tulis yang digunakan berasal dari kaleng kosong dari sebuah Warung Cina. Pemagaran terhadap sebidang tanah yang sebagaimana tempat anak – anak dalam penggembalaan kerbau yang menyimpan kerbaunya semasa anak – anak tersebut menempuh pendidikan yang juga diawasi oleh seseorang yang telah tergolong ke dalam umur “dewasa”. Sekolah ini dibuka 2 sesi yaitu pukul 9.00 – 12.00 dengan 13.00 – 15.00. Inilah tipe – tipe sekolah yang dirasa cocok oleh Gubernur Jenderal *Van Heutz* dalam menciptakan sekolah yang baru yaitu *Volkschool*.

Alasan yang mendasari pandangan sekolah yang lebih sederhana dengan lebih murah dari Gubernur *Van Heutz* itu sendiri ialah :

- a. Sekolah ini termasuk murah dan dapat didirikan dengan sistem kegotong-royongan dari para penduduk perdesaan tanpa adanya kecampur-tanganan anggaran biaya dari pemerintah itu sendiri.
- b. Sekolah ini menjadikan suatu bagian keintegralan masyarakat desa yang memandang sebagai pemilik dari sekolah tersebut.
- c. Sekolah yang menerapkan kurikulum ini tidaklah dapat mengasingkan anak – anak dari kehidupan agraris sebagai sumber mata pencaharian di desanya.
- d. Sekolah ini menjadi penghubung dalam lumbung desa yang menggunakan pendidik sebagai tenaga administrasi.
- e. Agar adanya penekanan biaya terhadap masyarakat desa maka dapat menggunakan balai desa setempat sebagai sumber belajar anak – anak yang menempuh pendidikan itu sendiri.

Awal pendirian dari *Volkschool* ini mendapatkan penolakan yang keras dari masyarakat desa namun

dari sisi Gubernur Jenderal *Van Heutz* ini memandang bahwa *Volkschool* ini memiliki *benefit* yang banyak dan bermanfaat bagi masyarakat perdesaan terutama anak – anak. *Van Heutz* juga menginstruksikan kepada Direktur dari Departemen Pengajaran dan Agama serta Direktur dari Departemen Dalam Negeri agar dapat mempelajari dan memahami sepenuhnya mengenai *planning* dari *Volkschool* tersebut. Melihat sudut pandang kedua direktur tersebut lebih merekomendasikan beberapa perubahan – perubahan di dalamnya. Kedua direktur pun mengutarakan pendapatnya bahwa peran pemerintah disini memerlukan suatu bantuan anggaran *financial* di dalam *Volkschool*. Perdesaan tidak bisa diperuntukkan menjadi tumpuan beban dan juga satuan badan dalam mempertanggungjawabkan sekolah tersebut. Karena masyarakat desa tidak selamanya serasi menjadi pendidik maka diperlukannya pendidik – pendidik khusus dan juga percobaan akan adanya keberadaan *Volkschool* ini sendiri berupa suatu percobaan terlebih dahulu sebelum adanya jaringan – jaringan ekspansi yang lebih luas dan juga secara besar – besaran.

Pasca pengadaan *eksperimen* dalam sekolah ini sendiri maka mendapatkan kemungkinan keberhasilan dalam sekolah ini. Keberhasilan itu sendiri yang disebabkan adanya bantuan sepenuhnya dari adanya pelbagai instansi dan juga tokoh – tokoh pemerintah sebagai sponsornya. Pegawai pemerintah yang sangat begitu terhormat dalam pandangan masyarakat dan dianggap sebagai perintah yang otoriter (harus dipenuhi dan harus terlaksana) meskipun dalam segi prinsip masyarakat yang melarang adanya pendirian gedung – gedung sekolah di perdesaan dengan menuntaskan terlebih dahulu dengan jalan musyawarah dan himbuan dari masyarakat daerah tersebut.

Pengawasan sekolah ini pula dilaksanakan pasca adanya pengangkatan seorang inspektur khusus yang memiliki pangkat sebagai asisten residen. Pasca di tahun 1918 terbukti bahwa *Volkschool* ini pula berhasil dan tenaga administrasi pun langsung dipindahkan kepada Direktur dari Departemen Pengajaran dan Agama yang dibantu oleh bawahan – bawahannya. Mengenai ide dari pendirian sekolah ini sebenarnya bukanlah penciptaan sekolah – sekolah yang baru namun pernah menjadi bahan *eksperimen* di daerah Tapanuli, Sulawesi Utara dan Pulau Roti serta di Sumatera Barat pada 1843.

Meskipun demikian, *Volkschool* ini tidak pernah mencapai tujuan – tujuannya dalam meraih lembaga pendidikan yang memiliki sifat “universal” untuk keseluruhan masyarakat. Alasan ialah :

- a. Biaya *financial* yang menurut pemerintah tidak dapat ditanggungnya.
- b. Terdapat asumsi yang mengatakan bahwa masyarakat perdesaan lebih menyukai dan menggemari serta lebih bahagia dengan adanya pendirian sekolah – sekolah non formal.
- c. Sebab mereka telah menikmati adanya penempuhan dari pendidikan formal ini maka mereka menjadi enggan untuk bekerja di ladang persawahan kembali dan akhirnya terjadi anggapan bahwa tak ada gunanya mendirikan sekolah formal bagi orang – orang perdesaan yang tidak menghargai pendirian sekolah formal tersebut.

Adanya peralihan abad ke 20, pendidikan di mata rakyat perdesaan menjadi pusat perhatian yang sangatlah penting. Alasan yang memperkuatnya ialah :

- a. Adanya penguatan idealistik terhadap kebijakan Politik Etis terutama dalam bidang pendidikan.
- b. Adanya kebangkitan Asia.
- c. Adanya pemberian pendidikan yang lebih baik di tanah jajahan lainnya.

Di tahun 1901, terdapat hanya 212 Sekolah Angka Dua pemerintah dan sebanyak 230 sekolah swasta bersubsidi untuk 25 juta penduduk ataupun yang hanya satu sekolah untuk 57.000 orang. Inilah yang menjadi pelbagai kemungkinan dalam mempertimbangkan kembali dalam ekspansi pendirian sekolah itu sendiri terutama dalam perdesaan. Sekolah Angka Dua dianggap terlalu mahal dalam pembiayaan SPP-nya maka dari sinilah dicarikan kembali dalam tipe – tipe sekolah lain yang baru, lebih murah dan lebih sederhana yang kemudian diberikan nama *Volkschool*. Ada pula cara lainnya ialah dengan sekolah – sekolah swasta yang dapat memberikan sebuah subsidi SPP dengan melipatgandakan jumlah sekolah dengan biaya yang sama.

Namun cara lainnya tersebut ditolak mentah – mentah dikarenakan pemerintah tidak memiliki niat dan hasrat dalam membentuk pendidikan formal yang memiliki sifat “universal” di Indonesia. Ada pula yang memberikan saran dalam mempercayakan pendidikan kepada misi dengan subsidi pemerintah namun politik netral yang bertubuh dalam pemerintah menghalanginya dalam pemberian uang terhadap organisasi – organisasi yang religius. Kemungkinan lainnya terdapat dalam perubahan pesantren ataupun madrasah

menjadi *Volkschool* dengan kurikulum yang memiliki sifat “umum”. Sebenarnya, ide perubahan madrasah menjadi sekolah umum itu tidaklah baru dan pernah direkomendasikan oleh Van der Capellen pada 1820. Anak – anak Indonesia lebih banyak masuk ke pesantren – pesantren dan memasukkan pembelajaran sekuler di dalamnya seperti membaca, menulis dan berhitung agar menyegerakan dalam pemecahan masalah pendidikan universal. Pendidik – pendidik agama tidak diberikan suatu penataran khusus.

Keuntungan lainnya ialah tidak adanya keperluan dalam pendirian gedung – gedung sekolah yang baru dengan adanya penggunaan pesantren yang ada. Lagi pula, dengan adanya pengawasan terhadap gerak – gerak pendidik – pendidik agama dapat menghindarkan suatu penganjuran akan pemberontakan – pemberontakan yang ada. Dari hal inilah, yang menjadikan tokoh – tokoh Islam pun mendapatkan suatu protes yang sebagaimana bahwa terdapat pandangan dalam bentuk pengekangan terhadap kebebasan keagamaan di daerah setempat yang perlu adanya suatu sedapat – dapatnya dielakkan.

Kemudian, pesantren disini dirasa tidak cocok apabila dijadikan sebuah sekolah. Kemungkinan pula justru dengan adanya cara inilah pendidik – pendidik agama, apa lagi yang pernah hijrah ke Mekkah akan memperoleh suatu idealistik. Idealistik itu pula berupa suatu ancaman – ancaman yang besar dalam mempengaruhi suatu kedudukan – kedudukan yang ada di dalam tubuh pemerintahan Belanda.

### **Penggunaan Kurikulum *Volkschool***

Di dalam adanya laporan pendidikan tahun 1892 – 1893, ternyata besarnya jumlah masyarakat yang sudah melek huruf terutama dalam pembacaan huruf tulisan lokal di Jawa sebanyak hanya 3.964 dari 51.464 kepala desa atau sekitaran dengan kisaran 8% untuk presentasinya. Lebih mengherankannya lagi bahwa hanya sebanyak 6.650 dari 26.708 juru tulis atau sekitaran hampir 25% untuk presentasinya yang dapat memahami dan menuliskan huruf – huruf Latin. Selain itu, kemampuan berhitung pula sangatlah rendah yaitu hanya sebanyak 2% dari kepala desa di Jawa yang dapat memecahkan persoalan dari bilangan pecahan yang ada. Meskipun penetapan kurikulum yang ada didalam *Volkschool* sangatlah sederhana namun tidak dapat disangkal relevansinya dengan kebutuhan yang ada di dalam rakyat desa itu sendiri. Meskipun terdapat adanya saran – saran dalam mengekspansikan kurikulum *Volkschool* dengan adanya pekerjaan tangan, pengetahuan mengenai gejala – gejala yang dihadapkan oleh petani dari kehidupan sehari – harinya dengan lain sebagainya namun penerapan dalam kebijakan kurikulum *Volkschool* tetaplah sangatlah sederhana. Adapun permissalan di *Volkschool* Aceh :

Kelas I : Membaca dan menulis Bahasa Melayu dengan huruf – huruf Latin.

Latihan bercakap – cakap.

Berhitung 1 – 20.

Kelas II : Lanjutan : Membaca dan Menulis dengan huruf – huruf Latin dan Arab.

Dikte dalam kedua macam tulisan tersebut.

Kelas III : Ulangan.

Berhitung di atas 100. Pecahan Sederhana.

Di daerah Jawa itu sendiri juga adanya penyesuaian dengan adanya situasi dan kondisi setempat dengan digunakannya bahasa – bahasa daerah sebagai bahasa – bahasa pengantarnya. Untuk Bahasa Melayu itu sendiri tidak menjadi bagian dalam mata pelajaran dan juga dengan adanya pembelajaran Bahasa Melayu akan menghambat dan menghalangi lanjutan pelajaran dan komunikasi yang ada di penduduk – penduduk lain di Indonesia. Namun, lulusan – lulusan dari *Volkschool* inilah yang tidak adanya mengharapkan bahwa dapat memperluas segi cakrawala – cakrawalnya di luar dari perbatasan perdesaan tersebut. Sama seperti halnya dengan Sekolah Angka Dua yang sebagaimana *Volkschool* pun dirasa tidaklah memenuhi keinginan peserta didik dalam melanjutkan pembelajarannya. Di dalam adanya masa kemajuan komunikasi dengan transportasi rasanya sangatlah tidak mungkin dalam mengisolasi perdesaan dengan pengaruh – pengaruh dari kota. Terdapat beberapa anak yang menginginkan pemindahan ke Sekolah Angka Dua.

Dari adanya beberapa anak inilah yang menjadikan suatu dorongan yang kuat dan melanjutkan ke Kelas 3 di Sekolah Angka Dua maka akan mengakibatkan adanya kerugian waktu selama satu tahun. Peralihan ke Sekolah Angka Dua diresmikan semenjak adanya pendirian *Vervolgschool* (Sekolah Sambungan) yang terdiri atas Kelas IV dan Kelas V. Dari sinilah yang mengakibatkan bahwa Sekolah Angka Dua dirasa kurang lengkap.

Lama kelamaan terjadilah suatu kombinasi yang erat di dalam sistem Sekolah Desa – Sekolah Sambungan (Volkschool – Vervolgschool). Adanya kesulitan *financial* dari pemerintah pada (1922 – 1923) maka mempercepat laju kombinasi. Menjadikan Volkschool (Sekolah Desa) sebagai sub-struktur dari adanya Vervolgschool (Sekolah Sambungan) dengan direvisikannya penerapan kurikulum – kurikulum yang digunakan dalam Volkschool itu sendiri agar sesuai dengan Vervolgschool. Pada akhirnya, Volkschool ini sendiri menjadi bagian dari Sekolah Angka Dua yang pada awalnya menjadi keinginan pemerintah dalam pengelekan untuk penyatuan keduanya.

### **Pendidik di Volkschool**

Di dasari oleh adanya keinginan yang kuat dalam pendirian Volkschool itu sendiri dalam kesederhanaan dan kemurahan, Van Heutz merasa tidak memerlukan pencarian terhadap guru yang memiliki kompetensi dan menganggap bahwa juru tulis perdesaan sudah memadai dalam menjadi seorang pendidik di Volkschool. Namun, atas saran dari Direktur Departemen Pengajaran dan Agama dengan para inspektur lainnya maka diangkatlah seorang pendidik tiap sekolah yang ada di daerah perdesaan. Namun, lulusan dari Sekolah Angka Dua merupakan kandidat yang cukup efisien dalam pemberian wewenang untuk dijadikan sebagai pendidik di Volkschool. Pendidik yang lebih berkompotensi biasanya akan mahal dan juga tidak adanya ketersediaan untuk mengajar di lingkungan yang primitif (perdesaan). Pendidik Volkschool yang baik akan memindahkan dirinya ke kota dan mencari pekerjaan yang baru disana. Demi mencegah adanya hal ini maka Direktur Departemen Dalam Negeri meminta kepada semua kepala pemerintahan daerah untuk tidak menerima pendidik sebagai seorang pegawai tetap sebelum mereka mengemban tugas selama 5 tahun. Ekspansi yang ada di dalam penggadaan rumah, pendidikan, jawatan kereta api dan perkebunan merupakan lowongan pekerjaan yang lebih menguntungkan dari pendidik di Volkschool. Namun, adanya pembatasan dalam mencari lowongan pekerjaan inilah yang menjadi semakin ketidakmenarikan orang – orang dalam mendaftar dirinya sebagai pendidik di Volkschool. Dari sinilah, diadakannya ekspansi Volkschool yang secara terpaksa menerima lulusan dari Sekolah Angka Dua swasta sebagai guru di Volkschool.

Merasakan kembali bahwa lulusan dari Sekolah Angka Dua yang sering berusia 12 – 13 tahun masih sangatlah muda dan kurang mampu menghadapi sekolah dengan 3 kelas dan memiliki peserta didik sebanyak 50 – 100 peserta didik. Dari sinilah, timbullah saran – saran dalam perbaikan mutu – mutu guru di Volkschool. Namun, di abad ke 19, pendidik – pendidik yang mengajar tidak memerlukan ijazah guru dan seketika mereka hendak menginginkan untuk menjadi guru haruslah magang kepada sekolah – sekolah yang ada di bawah pendampingan dan bimbingan dari pendidik – pendidik yang telah memiliki pengalaman. Pasca didapatkannya latihan maka ia pun dengan resmi menjadi seorang pendidik. Kemudian, pendidik disini harus memiliki ijazah pendidik yang diperoleh dari pemerintah ataupun komisi sekolah lokal yang ada. Adanya pemberlakuan sistem – sistem magang inilah dirasa yang paling baik dalam mengatasi permasalahan – permasalahan yang ada khususnya dalam kekurangan seorang pendidik. Sebanyak maksimal 4 calon kandidat yang diserahkan oleh kepala sekolah di Sekolah Angka Dua.

Calon kandidat tersebut haruslah lulus di Sekolah Angka Dua selama 5 tahun namun adanya penerimaan calon kandidat yang tidaklah sesuai dengan persyaratan maka itu hanyalah terpaksa saja. Lamanya latihan magang seorang pendidik selama satu tahun dan pengadaannya di Sekolah Angka Dua pemerintah yang dibawah oleh bimbingan kepala sekolah dari lulusan Kweekschool (Sekolah Pendidik). Mengenai pelajaran, pelajaran akan diberlangsungkan pada sore hari sedangkan untuk praktik mengajarnya sendiri pun dilaksanakan pada pagi hari dan tiap calon kandidat yang lulus maka akan diberikannya sebuah upah khususnya untuk pembimbingnya sebanyak f 30.

Di tahun 1916, pendidikan magang itu sendiri pula diperpanjang hingga 2 tahun. Pelajaran sore hari dilaksanakan sebanyak 3x seminggu. Di dalam tahun pertama, calon kandidat akan banyak menghadiri pelajaran dan di tahun kedua maka didapatkanlah suatu izin dalam membantu dan mengajar. Calon kandidat harus berusia 13 – 17 tahun dan melalui jalur tes masuk dan tiap calon yang lulus dari tes masuk akan mendapatkan upah berupa uang saku sebesar f 8 / bulan serta pemakaian buku hanya diberikan secara cuma – cuma oleh pemerintah kecuali jikalau lulus ujian maka akan menjadi hak milik.

Umumnya, pendidik yang mengajar di Volkschool sebenarnya lebih rendah mutunya dibandingkan

dengan pendidik – pendidik yang mengajar di sekolah lainnya. Pasca dijadikannya seorang pendidik maka tidak adanya pengusahaan dan kesempatan dalam ekspansi dan menyelusuri pemahaman – pemahaman pelajaran lebih dalam khususnya dalam pengetahuan dan wawasannya. Namun, dari segi keuntungannya maka mereka akan tetap tinggal di perdesaan. Mendidik seorang pendidik di kota akan membuat mereka enggan untuk mendidik kembali di daerah perdesaan kembali. Inilah yang membuat pemerintah merasakan dilemma kembali dalam merevisi kembali mutu – mutu seorang pendidik dan mengupayakan agar mereka dapat menetap di perdesaan. Mengenai upah pendidik yang berada di daerah perdesaan mendapatkan upah  $f$  15 yang sebagiannya diperoleh dari pendapatan pemerintah dengan sebagiannya lagi dari SPP peserta didik dan bunga yang ada di lumbung desa namun apabila diangkatnya pendidik kedua maka pendidik ini akan memperoleh  $f$  10 / bulan serta pendidik – pendidik baik pertama maupun kedua maupun sebagainya maka akan diberikan hak prerogatif dari pemerintahan agar dibebas-tugaskan dari kerja rodi yang ada.

Pendidik dengan pengetahuan yang dangkal tidak akan pernah mencetuskan idealistik – idealistik yang revolusioner dalam masyarakat perdesaan. Memang mereka bukanlah pencetus – pencetus idealistik – idealistik yang baru melainkan hanya sebagai alat pemerintahan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Inspeksi ketatnya tidak akan memberikan banyak kebebasan dalam dunia revitalisasi dan rupanya juga tidak akan memulai sesuatu bahan percobaan yang baru meskipun diberikan kebebasan yang lebih banyak.

### **Fasilitas Pendukung di Volkschool**

Pendirian Volkschool didasarkan pada prinsip – prinsip yang ada di dalam pembantuan diri sendiri dengan ruang lingkup dari sifat kegotong-royongan yang ada di dalam masyarakat perdesaan tersebut. Pendirian dan pemeliharaan akan gedung – gedung sekolah oleh penduduk perdesaan yang memiliki anggapan bahwa pengorbanan inilah yang akan menambah keamatan dengan adanya penghargaan dari masyarakat mengenai pentingnya penanaman pendidikan itu sendiri di daerah perdesaan. Namun, di dalam praktiknya sendiri, bantuan dari pemerintah pun tidak bisa terlepas begitu saja terutama dalam mengatasi kesulitan pertama untuk mendapatkan bahan – bahan yang tidak memungkinkan diperolehnya dari masyarakat perdesaan seperti halnya semen, paku. Pemerintah mengeluarkan anggaran pembiayaan sebesar  $f$  50, - dalam rangka pembangunan gedung – gedung sekolah dengan  $f$  25, - untuk perabotan yang akan digunakan dalam gedung – gedung sekolah tersebut. Alas yang berupa kayu berasal dari hutan yang dilindungi oleh pemerintah Hindia Belanda dan terkadang menjadi suatu tantangan dalam bentuk keberatan dari pihak jawatan kehutanan yang menimbulkan kesukaran diperolehnya kayu tersebut sebagai alasnya. Untuk fasilitas dalam pelajarannya menggunakan kayu panjang untuk diduduki oleh 4 orang peserta didik. Buku – buku yang menjadi sumber rujukan dalam pembelajaran disumbangkan langsung oleh pemerintahan namun ada beberapa alat tulis yang harus dibeli sendiri oleh peserta didik seperti halnya batu tulis dengan anak batu tulis. Untuk papan tulisnya sendiri menggunakan satu atau dua buah papan tulis bersandaran, terdapat juga rak buku untuk menyimpan buku – buku sumbangan pemerintah yang sebagaimana buku – buku yang dipinjamkan tidaklah diizinkan untuk dibawa pulang serta adanya gambar – gambar peta yang telah digambar oleh pendidik sebagai sumber rujukan yang melengkapi atas sumber – sumber buku yang digunakan. Di tahun 1911, pemerintah mengeluarkan  $f$  442.420 untuk anggaran pembiayaan dari Volkschool itu sendiri yang pada akhirnya meningkat menjadi sekitar  $f$  1 juta direntang tahun 1913 – 1919 kemudian di tahun berikutnya yaitu tahun 1920 meningkat kembali menjadi  $f$  3 juta per tahunnya.

### **Inspeksi yang Digunakan Dalam Volkschool**

Berbicara mengenai inspeksi ini sendiri dapat dilihat pada tahun 1911 yang mana diangkatlah seorang inspektur yang memikul beban peertanggungjawaban dalam semua Volkschool yang didirikan di seluruh permukaan perdesaan di Hindia Belanda yang bernaungkan dibawah komando dari Departemen Dalam Negeri namun keseluruhan informasi yang ada di dalam Volkschool pula diberitahukan kepada Direktur Departemen Pengajaran dan Agama. Pelaksanaan dari tugas inspektur tersebut dibantu pula oleh 3 asisten inspektur, penilik kepala dengan penilik orang Indonesia. Di beberapa kedaerahan, Volkschool ini sendiri juga ditilik oleh kepala penilik dari Sekolah Angka Dua yang berada di daerah sekitarnya.

Tiap penilik yang bertugas dalam Volkschool ini biasanya memikul beban pertanggungjawaban atas

pengawasan 50 sekolah atau lebih. Demikian pula dengan inspektur, para penilik sekolah yang ditilik berasal dari pendidik – pendidik yang memiliki gelar “terbaik” dan menerima upah tambahan sebesar  $f 10$ , - per bulannya. Pihak – pihak yang bertugas dapat melakukan pengunjungan kepada Volkschool itu sendiri minimal sekali dalam setahun dan melaporkan seperti apa keadaan sekolah, bagaimana dengan pelaksanaan akan peraturan – peraturan dan kurikulum yang diterapkan di Volkschool secara cermat, efisien dan efektif. Penguraian akan tugas – tugas mereka lebih memandang terhadap inspeksi yang ada di dalam keadaan dari gedung sekolah tersebut, perabot-perabot yang digunakan, inventaris-inventaris, administrasi, presensi peserta didik dan pendidik, pengembangan dalam diri peserta didik yang melibatkan dalam hal membaca, tulis menulis dan berhitung serta adanya kemampuan – kemampuan yang dimiliki oleh pendidik dalam perihal pengajaran dan juga upah yang diberikan kepada pendidik. Adanya pengangkatan penilik yang berasal dari Indonesia ternyata membawa suatu kebijaksanaan dalam penerapannya. Penilik sekolah disini tidak hanya serta merta menginspeksi pendidiknya saja akan tetapi melaksanakan suatu perbimbingan pendidik perihal pengajaran yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Hal ini sangatlah diperlukan sebab biasanya pendidik Volkschool memiliki latar belakang pendidikan yang minim dan rendah. Inilah yang menyebabkan penugasan dalam inspeksi memiliki aspek penilikan dan juga aspek penilaian yang tinggi terhadap seorang pendidik sebelum mengajar di Volkschool. Ada yang memiliki anggapan bahwa aspek pendidikan yang dimaksud merupakan penugasan utama dari adanya inspeksi tersebut. Hal ini pula yang menyebabkan penugasan inspeksi yang serupa yang akan memberikan pencegahan terhadap kemerosotan – kemerosotan dari adanya mutu – mutu Volkschool tersebut.

Para penilik sekolah merupakan bawahan yang dikomandoi oleh atasan yang lebih tinggi berupa instansi yang lebih tinggi dari mereka. Laporan demi laporan yang ditulis dan dilaporkan mengenai sekolah akan disampaikan dari penilik sekolah kepada kepala pemilik penilik sekolah yang diteruskan kepada Controleur, Regen, Residen dan seterusnya hingga sampai kepada telinga dan tangan dari Direktur Departemen Pengajaran Agama dengan Direktur Departemen Dalam Negeri. Dapat dikatakan kembali bahwa semua yang ada di dalam Volkschool baik atau buruknya pasti akan tersampaikan kepada telinga dan tangan dari Gubernur Jenderal dengan pemerintahan pusat yang berada di Den Haag, Belanda.

### **Keadaan Peserta Didik Volkschool**

Pasca terselesaikannya pendirian dari Volkschool ini sendiri sebagai sekolah eksperimen di tahun 1907, populasi yang tumbuh dari Volkschool ini sendiri meningkat drastis menjadi sekitaran 70.000 di tahun 1910, sekitaran lebih dari 300.000 di tahun 1914 dengan adanya penambahan rata – rata 40.000 peserta didik di tiap tahunnya. Rentang tahun 1914 penambahan peserta didik ternyata tidak sebesar tahun – tahun sebelumnya yang disebabkan adanya keseluruhan administrasi sekolah yang dipindahkan dari Departemen Dalam Negeri sangatlah disegani oleh masyarakat kepada Departemen Pengajaran dan Agama yang tidak memiliki otoritas yang tinggi di mata masyarakat perdesaan. Seperti halnya dari sekolah–sekolah lain yang memiliki proporsi peserta didik dari wanita rendah sekitaran 6,3% tahun 1914 dengan 10,3% tahun 1919. Namun, penampakan dari adanya penambahan dari peserta didik membawakan suatu kegembiraan itu sendiri. Gadis – gadis khususnya yang tinggal di daerah perdesaan sangatlah diperlukannya tenaga mereka seketika mereka berada di rumah maupun di sawah, perkawinan mereka yang begitu cepat umurnya serta adanya korelasi mereka diantara anak–anak mereka baik laki–laki maupun perempuan yang melarang mereka pasca mendapatkan usia yang pubertas. Jumlah peserta didik yang putus sekolah pun terbilang cukup tinggi khususnya mereka yang berada di kelas – kelas yang rendah.

Di tahun 1909 sendiri, sekitaran lebih dari 80% peserta didik yang mengalami putus sekolah yang telah terdaftar dari grafik kelas 1 kemudian di kelas 2 itu sendiri memiliki peserta didik yang hanya sekitaran kurang dari seperlimanya dari kelas 1 serta jumlah peserta didik kelas 3 itu sendiri kurang dari seperdelapan belas dari adanya peserta didik yang duduk di kelas 1. Kelas 1 yang hanya memulai dari 40 peserta didik maka akan berakhir di kelas 3 hanya 2 – 3 murid saja. Laporan dari tahun 1909, di 723 sekolah di Jawa hanya memiliki pendaftaran 1854 anak pria dengan 67 anak wanita yang duduk di kelas 3 yang memiliki rata – rata hanya 2 – 3 anak pria di tiap sekolahnya dengan seorang peserta didik berjenis kelamin perempuan di tiap 10 – 11 sekolah.

Berdasarkan dari adanya laporan tahun 1911, alasan yang mendukung dalam angka pemutusan sekolah ini sebenarnya sekitaran 50% disebabkan adanya ketidakteraturan dalam presensi pelajaran yang ada dari



sang peserta didiknya kemudian alasan – alasan yang kurang diketahui alasannya, 13% dikarenakan sakit atau meninggal dunia sedangkan 16%nya lagi disebabkan adanya pemindahan peserta didik ke perdesaan lain. Banyak dari orang tua peserta didik yang mempekerjakan anak – anaknya untuk membantu pekerjaan mereka di sawah ataupun di rumah. Inilah yang menjadikan suatu ketidak adanya keharapan yang timbul dari para orang tua peserta didik untuk menyekolahkan anak – anak mereka terutama mengenai presensi kehadiran anak – anak mereka di sekolah. Anak yang bersekolah atau tidaknya semua tergantung terhadap pada orang tua peserta didiknya. Maka dari sinilah, muncul suatu anggapan dari para orang tua peserta didik yang menanamkan “Lebih baik keluar saja dibandingkan anak – anak mereka tinggal di kelas dikarenakan adanya presensi kehadiran tersebut”. Namun pasca tahun 1909, daya penahan yang dimiliki tiap sekolah ternyata bertambah kuat. Seperti halnya dalam kelas 1 memiliki peserta didik sebanyak 100 orang maka diproposikan di kelas 1 secara berturut – turut dari kelas 1,2 dan 3 menjadi 100; 36,3; dan 12,2 di tahun 1909. Namun di tahun 1919 menjadi 100; 61; dan 41,6 yang sebagaimana mengalami kemajuan dan peningkatan. Meskipun adanya kesukaran di dalam perbaikan sebab – musabab tersebut maka bisa jadi akan adanya timbul suatu peningkatan inspeksi dan juga kemungkinan dalam penumbuhan suatu pengembangan yang lebih luas dalam melanjutkan pelajaran yang ada di *Volkschool* tersebut.

**Tabel 1. Jumlah Peserta Didik di *Volkschool***

Tahun	Pria	Wanita	Jumlah
1910	-	-	71.239
1914	280.676	19.385	301.061
1915	286.823	24.044	310.867
1916	316.294	31.457	347.751
1917	329.655	34.420	365.075
1918	325.631	34.924	360.924
1919	321.360	36.320	357.680
1920	-	-	396.408

**Tabel 2. Distribusi Peserta Didik di Berbagai Kelas di *Volkschool* di Jawa**

Kelas	Pria	Wanita	Jumlah	Presentase	Perbandingan
I	32.999	2.731	35.730	81,6	100
II	5.763	299	6.062	14,0	16,4
III	1.854	67	1.921	4,4	5,3

## SIMPULAN

Menyimpan banyak sejarah terutama di dalam sekolah itu sendiri. Sekolah itu berdiri di dalam pangkuan didikan kepada peserta didik yang dapat menimba ilmu untuk masa depan mereka. Sekolah ini pula yang menjadi ikon di dalam pengembangan pendidikan yang mengalir sesuai dengan aliran situasi dan kondisi yang ada di dalam pengembangan pendidikan tersebut. Pada tahun 1907 atau lebih tepatnya pasca pendirian dari adanya Sekolah Angka Satu dengan Sekolah Angka Dua didirikanlah pula ikonik sekolah versi terbaru dalam penerangan kesejahteraan masyarakat di masa kolonial yang ada. Namun, sistem penerapan di dalam sekolah ini pula mendapatkan dua perdebatan di dalamnya yang diutarakan oleh Menteri Jajahan Fock yang lebih berdasarkan kepada pengembangan yang lebih dari pasca adanya pendirian dari Sekolah Angka Dua sedangkan dalam Gubernur Jenderal Van Heutz ini sendiri lebih menekankan terhadap sekolah yang lebih murah, lebih sederhana dan juga adanya ekspansi yang lebih leluasa dan luas dibandingkan sebelumnya. Pendirian sekolah baru ini pula dinamakan dengan *Volkschool*. Penerapan di dalam kurikulumnya sendiri pun terbilang cukup sederhana. Kurikulumnya lebih menekankan terhadap pembelajaran yang diajarkan di dalam sekolah umum yang dilengkapi dengan adanya pembelajaran dari kehidupan sehari – hari dari seorang petani itu sendiri agar tidak melupakan mata pencahariannya yang berada di dalam permukaan sawah. Terlebih lagi, adanya pembelajaran yang berkaitan erat dengan kerajinan tangan itu sendiri. Mengenai pendidik dari *Volkschool* itu sendiri terdapat peraturan yang menetapkan bahwa pendidik yang telah mengemban tugas pengabdianya selama 5 tahun maka akan diberikan gelar sebagai “pegawai tetap pendidik”. Namun, menjadi seorang pendidik di *Volkschool* ini sendiri diperlukannya sebuah pelatihan magang tersebut terlebih dahulu yang dibantu dibawah bimbingan oleh pengajar – pengajar yang terbilang “pengajar profesional” dikarenakan

telah mengemban tugas pengajar dalam jangka waktu yang lama. Setelah itu, pendidik yang mengajar di *Volkschool* itu sendiri akan mendapatkan upah sebesar  $f$  15 namun apabila pendidik kedua mendapatkan upah sebesar  $f$  10 terlebih lagi mengemban tugas pendidik ini di dalam jangka waktu yang sangatlah lama baik pengajar pertama maupun pengajar kedua maka akan mendapatkan hak prerogatif dari pemerintah untuk dibebaskan tugasnya dari pekerjaan yang mendapatkan julukan “kerja rodi”. Sama seperti pada sekolah pada umumnya, *Volkschool* disini juga memiliki fasilitas – fasilitas pendukung di dalamnya. Terdapatnya gedung sekolah yang berdiri sederhana dengan menghabiskan dana dari pemerintah Hindia Belanda itu sendiri sebesar  $f$  50,- dengan perabotannya sebesar  $f$  25,-. Ditambah lagi, alas (lantai) yang ada di dalam gedung sekolah berasal dari bahan baku kayu dengan kursi panjang yang terbuat dari kayu yang cukup diduduki oleh 4 peserta didik yang ditambah pula dengan adanya sumbangan – sumbangan dari pemerintah itu sendiri di dalam buku – buku yang dijadikan sumber rujukan pembelajaran dalam peserta didik yang menempuh di *Volkschool* ini sendiri. *Volkschool* disini memiliki suatu inspeksi yang sebagaimana bertugas dalam mengemban pertanggungjawaban di dalam penjaminan *Volkschool* tersebut. Inspeksi ini banyak diambil dari rakyat – rakyat Indonesia itu sendiri untuk mengurusinya. Apabila terdapat permasalahan baik dengan kategori kecil, sedang maupun besar maka pasti keseluruhannya akan dilaporkan dari laporan demi laporan hingga sampailah kepada tangan dari Gubernur Jenderal Van Heutz itu sendiri yang pemerintah pusatnya berada di Den Haag, Belanda. Di dalam manajemen pendidikan terutama di dalam sekolah pasti termasuknya peserta didik yang menempuh di *Volkschool* itu sendiri. Mengenai keadaan peserta didik itu sendiri dapat terlihat bahwa grafiknya mengalami gambaran yang dinamis yang mana terkadang naik dan terkadang turun baik itu drastis ataupun secara *step by step*. Peserta didik yang menempuh di *Volkschool* ini terdapat pria dan wanita yang bisa menimba ilmu disana.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, R. (2021). *Belum Terlindungi Perda, Cagar Budaya Volkschool Ketjepit Harus Dijaga*. <https://rri.co.id/purwokerto/berita/banjarnegara/1267953/belum-terlindungi-perda-cagar-budaya-volkschool-ketjepit-harus-dijaga>.
- Adela, D. (2021). *Buku Ajar Filsafat Pendidikan*. Sukabumi: NUSAPUTRA PRESS.
- Afandi, A. N., Swastika, A. I., & Evendi, E. Y. (2020). Pendidikan Pada Masa Pemerintah Kolonial di Hindia Belanda Tahun 1900 - 1930. *Artefak*, 7(1), 21-30.
- Affandi. (2021). *Muhammadiyah Sangat Konsisten Mengembangkan dan Memajukan Pendidikan*. <https://radarjatim.id/muhammadiyah-sangat-konsisten-mengembangkan-dan-memajukan-pendidikan/>.
- Agung, L., & T., S. (2020). *Sejarah Pendidikan*. Yogyakarta: Ombak.
- Apriyono, H. (2018). *Hindia Belanda 1930*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Dirgantara, R. A. (2021). *Mengintip Kondisi 'Volkschool Ketjepit', Sekolah Rakyat Peninggalan Kolonial di Banjarnegara*. <https://www.liputan6.com/regional/read/4719052/mengintip-kondisi-volkschool-ketjepit-sekolah-rakyat-peninggalan-kolonial-di-banjarnegara>.
- E., P. A., & Puguh, S. T. (2021). Islamic and Dutch Schools in Jambi During Colonial Era. *Indonesian Historical Studies*, 5(1), 59-72.
- Fahrozy, F. P., Iskandar, S., Abidin, Y., & Sari, M. Z. (2022). Upaya Pembelajaran Abad 19-20 dan Pembelajaran Abad 21 di Indonesia. *Jurnal Basicedu: Journal of Elementary Education*, 6(2), 3093-3101.
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methode)*. Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan.
- Historism. (2021). *Pendidikan Masa Kolonial Belanda*. <https://museumpendidikannasional.upi.edu/pendidikan-masa-kolonial-belanda/>.
- Iswanto, S., Nurasiah, & Kesuma, T. B. (2021). Dutch Colonial Infrastructure Development in Takengon,. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 6(1), 15-25.
- Khoirul. (2022). *STM Dalam Bingkai Sejarah: Lintas Sejarah Pergerakan Pelajar Dalam Demokrasi*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media Yogyakarta.
- Kusmayadi, Y. (2017). Sejarah Perkembangan Pendidikan di Priangan 1900-1942. *Artefak*, 4(2), 141-152.
- Matanasi, P. (2018). *Sekolah-sekolah di Zaman Belanda*. <https://tirto.id/sekolah-sekolah-di-zaman-belanda-bXbV>.

- Melamba, B., & Sofianto, N. H. (2019). Protestan Christianity Education in Tolaki and Moronene Society in Southeast Sulawesi, 1919-1942. *TAWARIKH: Journal of Historical Studies*, 10(2), 133-156.
- Miftakhuddin. (2019). *Kolonialisme: Eksploitasi dan Pembangunan Menuju Hegemoni*. Kab. Sukabumi: CV Jejak.
- Muchlis, M., & Jumadi. (2019). Sekolah Rakyat di Enrekang, 1950-1959. *PATTINGALLOANG: Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesenjangan*, 6(2), 88-98.
- Muhibbin, A., & Fathoni, A. (2021). *Filsafat Pendidikan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Munandar, A. (2021). *Peranan Emma Poeradiredja Memajukan Pendidikan Perempuan Di Bandung Melalui Organisasi Pasundan Istri Tahun 1930-1942* [skripsi]. Tasikmalaya, (ID) : Universitas Siliwangi.
- Muzaki, K. (2021). *Menengok Volkschool Ketjepit, Jejak Politik Etis Era Kolonial Belanda di Punggelan Banjarnegara*. <https://jateng.tribunnews.com/2021/11/23/menengok-volkschool-ketjepit-jejak-politik-etis-era-kolonial-belanda-di-punggelan-banjarnegara>.
- Muzaki, K. (2021). *Yuks Menengok Volkschool Ketjepit, Jejak Sekolah Peninggalan Belanda di Punggelan Banjarnegara*. <https://banyumas.tribunnews.com/2021/11/23/yuks-menengok-volkschool-ketjepit-jejak-sekolah-peninggalan-belanda-di-punggelan-banjarnegara?page=all>.
- Nasution, S. (2020). *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Raihan, S., Nuraeni, Y., Suhendar, A., Megavitry, R., Girsang, S. E., Herman, et al. (2022). *Ilmu Pendidikan*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Ridlo. (2021). *Menjadi Cagar Budaya, Volkschool Ketjepit Sekolah Peninggalan Kolonial Belanda di Banjarnegara*. <https://www.gatra.com/news-529353-pendidikan-menjadi-cagar-budaya-volkschool-ketjepit-sekolah-peninggalan-kolonial-belanda-di-banjarnegara.html>.
- Sari, I. R. (2017). *Volkschool, Sekolah Rakyat Proyek Sosial Duta Museum Benteng Vredeburg 2017*. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/vredeburg/volkschool-sekolah-rakyat-proyek-sosial-duta-museum-benteng-vredeburg-2017/>.
- Setiawan, I. &. (2022). Sejarah Berdirinya Perguruan Tinggi 'Aisyiyah' (PTA) di Indonesia. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(1), 28-38.
- Suherman, A., & Bastaman, W. W. (2019). Perkembangan Sekolah Rakyat (Volkschool) Di Gunung Kencana Kabupaten Lebak Banten Tahun 1940 - 1964. *Bihari: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah*, 2(2), 11-21.
- Sukiyat, H. (2020). *Strategi Implementasi Pendidikan Karakter*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Winarta, K. (2017). *Volkschool, Sekolah Zaman Belanda Itu Kini Muncul di Jogja*. <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3038369/volkschool-sekolah-zaman-belanda-itu-kini-muncul-di-jogja>.